KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Mayoritas Fraksi Sepakat Bawa RUU Kesehatan ke Paripurna
Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 13

Mayoritas Fraksi Sepakat Bawa RUU Kesehatan ke Paripurna

Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan penyusunan RUU Kesehatan telah melibatkan dan menampung aspirasi dari para pemangku kepentingan.

Dinda Shabrina
dinda@mediaindonesia.com

MAYORITAS fraksi di Komisi IX DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan berlanjut ke tahap pengesahan sebagai undang-undang melalui mekanisme rapat paripurna yang digelar Selasa (20/6). Keputusan diambil setelah rapat pengambilan keputusan tingkat I menunjukkan bahwa 7 fraksi menyetujui dan hanya 2 fraksi yang tak sepakat beleid itu disahkan sebagai undang-undang.

Dari total 9 fraksi, 4 di antaranya menyetujui secara penuh pengesahan RUU Kesehatan, yakni Fraksi PDIP, PPP, PAN, dan Gerindra. Sebanyak tiga fraksi menyetujui dengan catatan, yakni Golkar, NasDem, dan PKB, sedangkan sisanya menolak RUU Kesehatan, yakni Fraksi Demokrat dan PKS.

"Yang menandatangani sebanyak 7 fraksi, yang menolak ada 2 fraksi, yaitu Demokrat dan PKS sehingga naskah RUU ini telah disepakati untuk ditindaklanjuti pada pembicaran tingkat II rapat paripurna pada besok 20 Juni 2023," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh dalam rapat kerja bersama pemerintah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku puas dengan keputusan tersebut. Ia menilai RUU Kesehatan ialah transformasi berbagai aturan tentang kesehatan yang selama ini berlaku. Di sisi lain, ia memahami rancangan beleid tersebut memicu pro dan kontra dari sejumlah kalangan. Namun, tegasnya, penyusunan RUU Kesehatan telah melibatkan dan menampung aspirasi dari para pemangku kepentingan. "Semua masukan yang diterima kami pertimbangkan dengan cermat guna penyempurnaan RUU Kesehatan ini. Pemerintah meyakini dengan disahkannya RUU ini, mari kita memetakan layar kapal besar bangsa Indonesia untuk bergerak maju," tandasnya.

Gugat ke MK

Lima organisasi profesi kesehatan berencana menggugat uji materiel ke Mahkamah Konstitusi jika RUU Kesehatan disahkan. Organisasi profesi itu ialah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Hal itu disebabkan pembahasan rancangan regulasi tersebut dinilai tanpa partisipasi publik secara bermakna dan bisa memperluas komersialisasi layanan kesehatan. "Kami yang sampai saat ini tidak diberikan kesempatan berdialog dan menyampaikan aspirasi kami. Sampai saat ini kami juga sulit mengetahui pembahasannya. Makanya sampai saat ini kami menolak RUU Kesehatan disahkan," ujar Ketua PPNI Harif Fadillah.

Senada, pengurus PDGI Paulus Januar Satyawan menyampaikan, ada tiga hal yang menjadi keprihatian dalam RUU Kesehatan, yakni proses yang tidak transparan, melemahkan demokrasi dan mengenyampingkan aspirasi masyarakat. Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani menilai naskah RUU Kesehatan belum mencakup secara keseluruhan terkait dengan sistem kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.

Ia juga menyoroti pembahasan RUU Kesehatan yang malah menimbulkan polemik di ruang publik. "Pembahasan RUU relatif cepat, diperlukan waktu lebih panjang agar mendalam dan kaya masukan. Dengan menimbang beberapa hal, PKS menolak RUU Kesehatan dilanjutkan pada tahap selanjutnya," tegas Netty. (Ant/Des/H-3)